

**PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
LEMBAR SOAL**

MATA PELAJARAN : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
KELAS : X (SEPULUH)
PROGRAM : IPA /IPS
WAKTU : 75 (menit)

Pilihlah Salah Satu Jawaban yang Paling tepat A, B, C, D atau E

1. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan
 - a. Eksekutif
 - b. Federatif
 - c. Koordinatif
 - d. Legislatif
 - e. Yudikatif
2. Perhatikan jenis-jenis kekuasaan berikut!
 - 1) Federatif
 - 2) Konstitutif
 - 3) Eksekutif
 - 4) Legislatif
 - 5) Yudikatif
 - 6) Eksaminatif
 - 7) Moneteryang merupakan kekuasaan negara menurut John Locke adalah
 - a. 1), 2), 3)
 - b. 1), 3), 4)
 - c. 2), 3), 4)
 - d. 3), 4), 5)
 - e. 5), 6), 7)
3. Kekuasaan federatif adalah
 - a. Kekuasaan membuat undang-undang
 - b. Kekuasaan melaksanakan undang-undang
 - c. Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri
 - d. Kekuasaan untuk mengadili
 - e. Kekuasaan untuk memperlancar keuangan negara
4. Teori Trias Politika dikemukakan oleh tokoh yang bernama

- a. Abraham Lincon
 - b. Aristoteles
 - c. John Locke
 - d. Montesquieu
 - e. Plato
5. Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggarannya merupakan tugas dari
- a. Lembaga eksekutif
 - b. Lembaga federatif
 - c. Lembaga konstitutif
 - d. Lembaga moneter
 - e. Lembaga yudikatif
6. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh
- a. BPK
 - b. DPR
 - c. MA
 - d. MPR
 - e. Presiden
7. Berikut yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah dan menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu dalam urusan
- a. Agama
 - b. Moneter
 - c. Pertahanan dan keamanan
 - d. Pendidikan
 - e. Politik luar negeri
8. Berikut yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah
- a. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
 - b. Memegang kekuasaan pemerintahan
 - c. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR
 - d. Menetapkan Peraturan Pemerintah
 - e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
9. Kementerian Negara Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada
- a. BPK

- b. DPR
 - c. KPK
 - d. MPR
 - e. Presiden
10. Berikut yang termasuk dalam Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yaitu ...
- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b. Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - c. Kementerian Sosial
 - d. Kementerian Keuangan
 - e. Kementerian Luar Negeri
11. Badan Urusan Logistik (BULOG) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang langsung dibawah koordinasi
- a. Menteri riset dan teknologi
 - b. Menteri dalam negeri
 - c. Menteri koordinator bidang perekonomian
 - d. Menteri lingkungan hidup
 - e. Menteri kesehatan
12. Berikut yang bukan merupakan sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah
- a. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
 - b. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
 - c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap kehidupan
 - d. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - e. Bersikap terbuka terhadap perubahan dan menerima segala yang datangnya dari luar negeri
13. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal
- a. 25A UUD 1945
 - b. 26 UUD 1945
 - c. 28A UUD 1945
 - d. 28J UUD 1945
 - e. 30 UUD 1945
14. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan
- a. Deklarasi Djuanda
 - b. Dekrit Presiden

- c. Perjanjian batas wilayah
 - d. Piagam Jakarta
 - e. Supersemar
15. Batas laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas termasuk dalam
- a. Zona Ekonomi eksklusif
 - b. Landas kontinen
 - c. Laut bebas
 - d. Laut luas
 - e. Laut teritorial
16. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan
- a. Penduduk
 - b. Orang asing
 - c. Warga negara
 - d. Bukan penduduk
 - e. Bukan warga negara
17. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah keturunan orang tuanya adalah
- a. Hak opsi
 - b. Ius soli
 - c. Hak repudiasi
 - d. Naturalisasi
 - e. Ius sanguinis
18. Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya. Kemungkinan status kewarganegaraan seseorang seperti di atas, disebut
- a. Ius Soli
 - b. Apatride
 - c. Bipatride
 - d. Ius Sanguinis
 - e. Naturalisasi
19. Proses permohonan warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan cara

- a. Mutasi
- b. Normalisasi
- c. Naturalisasi
- d. Transmigrasi
- e. Urbanisasi

20. Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut
- c. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing

21. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal

- a. 25
- b. 26
- c. 27
- d. 29
- e. 30

22. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia telah diatur dalam pasal

- a. 22 UUD RI Tahun 1945
- b. 24 UUD RI Tahun 1945
- c. 26 UUD RI Tahun 1945
- d. 28 UUD RI Tahun 1945
- e. 30 UUD RI Tahun 1945

23. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai

- a. Kekuatan utama sistem keamanan
- b. Kekuatan utama sistem pertahanan
- c. Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
- d. Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
- e. Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan

24. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan
- Menjadi prajurit TNI/Polri
 - Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - Mengikuti olimpiade fiika, matematika dan kimia di luar negeri
 - Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
25. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian
- Bela negara
 - Sistem bela negara
 - Pertahanan negara
 - Sistem keamanan nasional
 - Sishankamrata
26. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, merupakan bunyi dari pasal
- 27 ayat (1) UUD Tahun 1945
 - 27 ayat (2) UUD Tahun 1945
 - 27 ayat (3) UUD Tahun 1945
 - 30 ayat (4) UUD Tahun 1945
 - 30 ayat (5) UUD Tahun 1945
27. Keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut merupakan pengertian
- Budaya politik
 - Demokrasi
 - Sistem pemerintahan
 - Sistem pertahanan
 - Sistem politik
28. Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif disebut...
- Demonstran
 - Infrastruktur
 - Sistem politik

- d. Struktur politik
- e. Suprastruktur

29. Perhatikan data di bawah ini!

- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat
- 3) Dewan Perwakilan Daerah
- 4) Komisi Pemberantasan Korupsi
- 5) Presiden dan Wakil Presiden
- 6) Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah

- a. 1, 2, 3 dan 4
- b. 1, 3, 4 dan 5
- c. 1, 3, 5 dan 6
- d. 2, 3, 5 dan 6
- e. 3, 4, 5 dan 6

30. Perhatikan pernyataan berikut dibawah ini!

- 1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
- 2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
- 3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
- 4) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden

Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor

- a. 1, 2, dan 3
- b. 1, 3, dan 4
- c. 2, 4, dan 5
- d. 3, 4, dan 5
- e. 1, 3, dan 5